



**DINAS PERHUBUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH**

RENCANA KERJA OPD 2024
(Perubahan)



November 2024

KATA PENGANTAR

Pembangunan dan pengembangan sektor transportasi memiliki peranan yang besar dalam menunjang pertumbuhan ekonomi secara makro. Upaya untuk terus membenahi sarana/prasarana transportasi merupakan hal mutlak yang harus digalakkan sehingga dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada semua pengguna jasa.

Ketersediaan sarana, parasarana/fasilitas yang memadai merupakan faktor penting dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal di Provinsi Maluku pada umumnya dan Kabupaten Maluku Tengah pada khususnya dan merupakan unsur pemicu bagi Pemerintah Daerah terus-menerus dalam mengembangkan Sektor Perhubungan dengan tetap mengacu pada Tataran Transportasi Lokal Kabupaten Maluku Tengah dan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

Seiring dengan niat baik tersebut upaya membangun sektor perhubungan perlu digalakan secara maksimal. Olehnya itu melalui **Rencana Kerja (Perubahan) 2024 (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024** ini, kami sangat mengharapkan dukungan Pemerintah Daerah untuk turut membantu mengembangkan dan memajukan Sektor Perhubungan di Kabupaten Maluku Tengah.

Demikian RENJA ini kami ajukan, atas perhatian dan dukungannya kami ucapkan terima kasih.

Masohi, November 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



NILU ARI NURLETTE, S.E, M.Si

Pembina Tk. I – IV/b

NIP. 19690606 199703 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2023 ...	6
2.1. Evaluasi RENJA SKPD Tahun 2023 & Capaian Renstra SKPD	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	14
2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD.....	19
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	29
2.5. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	46
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024	48
3.1. Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD.....	48
3.2. Program dan Kegiatan.....	56
BAB IV PENUTUP	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif.

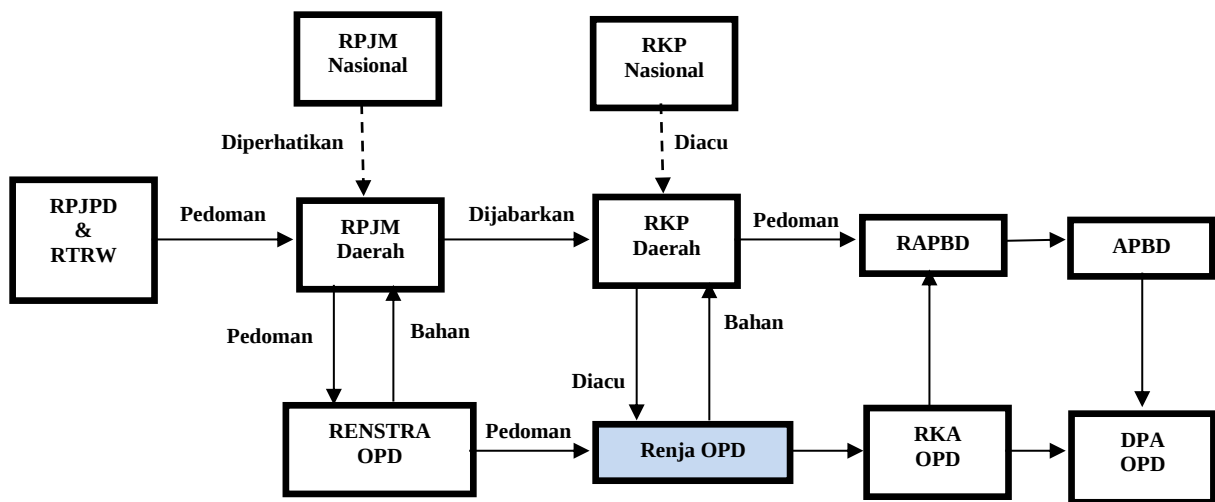
Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.

Penyusunan Renja OPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan Renja OPD; dan
2. Tahap penyajian rancangan Renja OPD.

Secara hierarki Renja OPD memiliki keterkaitan erat dengan dokumen perencanaan lain, dan digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut :





1.2. Landasan Hukum

Yang menjadi landasan hukum utama dalam penyusunan RENJA OPD adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
5. Surat Edaran Bersama (SEB) Kementerian Negara PPN/Bappenas dan Departemen Dalam Negeri Nomor : 0008/M.PPN/01/2007 perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2007.

Selain itu beberapa peraturan perundangan lainnya yang memiliki keterkaitan langsung dengan perencanaan OPD antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
5. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RENJA OPD dimaksudkan untuk memperoleh sebuah dokumen perencanaan yang komprehensif, akuntabel yang mampu mengakomodir berbagai usulan secara akomodatif sebagai landasan OPD bekerja selama satu tahun anggaran.

Adapun tujuan yang diharapkan dan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penyusunan RENJA OPD antara lain :

1. Memberikan arah bagi penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan di setiap OPD dalam mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan secara tepat , efektif, efisien serta akuntabel.
2. Mepertajam fokus program kerja OPD dalam menyelenggarakan proses pembangunan serta mampu menjembatani berbagai kepentingan-kepentingan dan aspirasi masyarakat.
3. Memberikan gambaran penggunaan anggaran secara efisien, transparan dan akuntabel berdasarkan prioritas-priorias penyelenggaraan pembangunan yang ingin dicapai oleh OPD.

1.4. Sistimatika Penulisan

Secara umum sistimatika penulisan Awal RENJA OPD dijabarkan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini djelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan RENJA OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.5. Latar Belakang

Berisikan pengertian umum tentang RENJA OPD, hubungan keterkaitannya dengan dokumen-dokumen terkait (RKPD, RENSTRA OPD, Renja K/L, dll), proses dan mekanisme penyusunannya.



1.6.Landasan Hukum

Memuat aturan-aturan hukum yang berlaku yang menjadi landasan penyusunan RENJA OPD.

1.7.Maksud dan Tujuan

Memuat maksud dan tujuan yang akan dicapai dengan penyusunan RENSTRA OPD.

1.8.Sistimatika Penulisan

Berisikan urutan penulisan RENSTRA OPD secara komprehensif.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2021

a. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021

Bagian ini berisikan evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2021 dan capaian Renstra PD.

b. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi OPD

Berisikan isu-isu strategis perhubungan; permasalahan yang dihadapi serta tantangan dan peluang yang menjadi acuan penyusunan RENJA OPD.

c. Review Terhadap RKPD

Berisikan rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dan analisis kebutuhan untuk Tahun 2024.

d. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Berisikan program-program yang muncul sebagai akibat penjangkaran aspirasi dari masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional



Berisikan kebijakan-kebijakan Nasional di sektor transportasi yang menjadi acuan serta program-program nasional yang dapat dilaksanakan di Kabupaten/Kota, yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan RENJA OPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA OPD

Berisikan tujuan dan sasaran Renstra yang ingin dicapai melalui penyusunan Renja OPD.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan Rencana Program dan kegiatan OPD Tahun 2024 yang menjadi prioritas yang telah disinergikan dengan RKPD maupun Renstra.

BAB IV P E N U T U P



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN ANGGARAN 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

1. Program, Kegiatan Sub Kegiatan

Secara umum pada Tahun Anggaran 2021, Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah merencanakan 3 (tiga) program pokok dengan 15 kegiatan serta 28 Sub Kegiatan yang dibiayai oleh Dana Alokasi Umum (APBD) Tahun Anggaran 2021 atau pagu indikatif DPA sebesar Rp. 19.925.326.519,-.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tertuang dalam Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Program dan Kegiatan Tahun 2023

NO	NAMA PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8 Kegiatan	21 Sub Kegiatan
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	5 Kegiatan	6 Sub Kegiatan
3.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1 Kegiatan	2 Sub Kegiatan

1. Tingkat Pencapaian Program

Dari 3 program pokok dan 14 kegiatan serta 29 Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah dalam Tahun Anggaran 2023 tersebut, dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja masing-masing sebagai berikut :



Tabel 2.2*Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan Tahun 2023*

NO.	NAMA PROGRAM	TINGKAT PENCAPAIAN (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21,39 %
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	18,47 %
3.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	20,12%

Dengan demikian tingkat pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah untuk Tahun Anggaran 2023 dapat dirata-ratakan sebesar 19,99 %.

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Secara garis besar dana APBD Tahun Anggaran 2023 yang dialokasikan dan realisasinya kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.3*Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2023*

No.	Uraian	Alokasi/Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentase %
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5.250.000.000,00	1.843.419.150,00	35,11
2.	Belanja Langsung dan Tidak Langsung (DAU/DAK/DID)	10.090.960.575,00	8.754.850.190,00	86,76

Berikut ini dapat kami sajikan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah sampai dengan Tahun 2023 meliputi Realisasi Kinerja Tahun 2023, Realisasi Target dan Kinerja Tahun 2023, sebagai tertera dalam Tabel berikut ini :



Tabel 2.1

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah Evaluasi Hasil Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023

KODE					URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OTTPUT)	SESUDAH PERUBAHAN						SISA PAGU	PERSEN TASE	KET
							TARGET			REALISASI					
							KINERJA		Rp.	KINERJA		Rp			
							Volume	Satuan		Volume	Satuan				
2	15				Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar										
2	15				Bidang Urusan Perhubungan										
2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21,39	Persen	8.495.794.307	21,39	Persen	7.616.710.072,00	879.084.235,00	89,65%	
2	15	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di rencanakan	2	Dokumen/ Laporan	145.284.000	2	Dokumen/ Laporan	145.251.000,00	33.000,00	99,98%	
2	15	1	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1	Dokumen	100.086.000	1	Dokumen	100.068.000,00	18.000,00	99,98%	
2	15	1	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kinerja Perangkat Daerah yang dievaluasi	1	Laporan	45.198.000	1	Laporan	45.183.000,00	15.000,00	99,97%	
2	15	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4	Dokumen/ Laporan	5.922.283.307	4	Dokumen/ Laporan	5.097.211.783,00	825.071.524,00	86,07%	



KODE					URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OTTPUT)	SESUDAH PERUBAHAN						SISA PAGU	PERSEN TASE	KET
							TARGET			REALISASI					
							KINERJA		Rp.	KINERJA		Rp			
							Volume	Satuan		Volume	Satuan				
2	15	1	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji Dan Tunjangan ASN	64	Org/Bln	5.734.633.307	60	Org/Bln	4.909.651.783,00	824.981.524,00	85,61%	
2	15	1	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	180.000.000	1	Dokumen	180.000.000,00	-	100,00%	
2	15	1	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Laporan	7.650.000	2	Laporan	7.560.000,00	90.000,00	98,82%	
2	15	1	02.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/Laporan administrasi pendapatan daerah	15	Dokumen/Laporan	1.305.300.000	15	Dokumen/Laporan	1.304.684.526,00	615.474,00	99,95%	
2	15	1	2.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1	Dokumen	300.000.000	1	Dokumen	299.994.526,00	5.474,00	100,00%	
2	15	1	2.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan,Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	14	Laporan	1.005.300.000	14	Laporan	1.004.690.000,00	610.000,00	99,94%	
2	15	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24,62	Persen	31.630.000	78,55	Persen	31.558.072,00	71.928,00	99,77%	
2	15	1	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Administrasi Kepegawaian yang didata dan dikelola	1	Dokumen	20.000.000	1	Dokumen	19.979.850,00	20.150,00	99,90%	
2	15	1	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2	Orang	11.630.000	2	Orang	11.578.222,00	51.778,00	99,55%	



KODE					URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OTTPUT)	SESUDAH PERUBAHAN						SISA PAGU	PERSEN TASE	KET
							TARGET			REALISASI					
							KINERJA		Rp.	KINERJA		Rp			
							Volume	Satuan		Volume	Satuan				
2	15	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	22,82	Persen	727.392.000	23	Persen	676.084.540,00	51.307.460,00	92,95 %	
2	15	1	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5	Paket	116.242.000	5	Paket	65.267.000,00	50.975.000,00	56,15%	
2	15	1	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	5	Paket	90.300.000	5	Paket	90.299.900,00	100,00	100,00%	
2	15	1	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2	Dokumen	13.850.000	2	Dokumen	13.850.000,00	-	100,00%	
2	15	1	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Laporan	507.000.000	2	Laporan	506.667.640,00	332.360,00	99,93%	
2	15	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	1	Unit	24.000.000	1	Unit	23.800.000,00	200.000,00	99,17%	
2	15	1	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	1	Unit	24.000.000	1	Unit	23.800.000,00	200.000,00	99,17%	
2	15	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	4	Laporan	70.449.000	4	Laporan	68.794.151,00	1.654.849,00	97,65%	
2	15	1	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	3.300.000	1	Laporan	3.300.000,00	-	100,00%	
2	15	1	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Laporan	26.100.000	1	Laporan	24.542.151,00	1.557.849,00	94,03%	



KODE					URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OTTPUT)	SESUDAH PERUBAHAN						SISA PAGU	PERSEN TASE	KET	
							TARGET			REALISASI						
							KINERJA		Rp.	KINERJA		Rp				
							Volume	Satuan		Volume	Satuan					
2	15	1	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	2	Laporan	41.049.000	2	Laporan	40.952.000,00	97.000,00	99,76%		
2	15	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	23,44	Persen	269.456.000	23	Persen	269.326.000,00	130.000,00	99,95%		
2	15	1	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	1	Unit	62.896.000	1	Unit	62.819.000,00	77.000,00	99,88%		
2	15	1	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	21	Unit	12.000.000	21	Unit	12.000.000,00	-	100,00%		
2	15	1	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	14	Unit	124.560.000	14	Unit	124.550.000,00	10.000,00	99,99%		
2	15	1	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit	70.000.000	1	Unit	69.957.000,00	43.000,00	99,94%		
2	9	15			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	18,47	Persen	899.104.450	18,47	Persen	689.695.450,00	209.409.000,00	76,71%		
2	15	2	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Indu Jaringan Trayek Transportasi Darat, Laut, penyeberangan dan	1	Dokumen	46.400.000	1	Dokumen	45.502.000,00	898.000,00	98,06%		



KODE					URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OTTPUT)	SESUDAH PERUBAHAN						SISA PAGU	PERSEN TASE	KET
							TARGET			REALISASI					
							KINERJA		Rp.	KINERJA		Rp			
							Volume	Satuan		Volume	Satuan				
						Angkuatn perkotaan dan perdesaan									
2	15	2	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang disusun	1	Dokumen	46.400.000	1	Dokumen	45.502.000,00	898.000,00	98,06%	
2	15	2	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C	4,93	Persen	7.457.450	5	Persen	7.457.450,00	-	100,00%	
2	15	2	2.03	0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dikembangkan	1	Unit	7.457.450	1	Unit	7.457.450,00	-	100,00%	
2	15	2	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor yang di uji Berkala	31,08	Persen	182.571.000	31	Persen	178.426.000,00	4.145.000,00	97,73%	
2	15	2	2.05	0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	1	Unit	144.503.000	1	Unit	143.914.000,00	589.000,00	99,59%	
2	15	2	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dipelihara	1	Unit	38.068.000	1	Unit	34.512.000,00	3.556.000,00	90,66%	
2	15	2	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	7	Laporan	130.187.000	7	Laporan	126.567.000,00	3.620.000,00	97,22%	



KODE					URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OTTPUT)	SESUDAH PERUBAHAN						SISA PAGU	PERSEN TASE	KET
							TARGET			REALISASI					
							KINERJA		Rp.	KINERJA		Rp			
							Volume	Satuan		Volume	Satuan				
2	15	2	2.08	0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang dilaksanakan	1	Laporan	130.187.000	1	Laporan	126.567.000,00	3.620.000,00	97,22%	
2	15	2	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang yang disediakan	20	Unit	328.000.000	20	Unit	127.424.000,00	200.576.000,00	38,85 %	
2	15	2	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang yang disediakan	20	Unit	328.000.000	20	Unit	127.424.000,00	200.576.000,00	38,85%	
2	15	2	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek	3	Laporan	204.489.000	3	Laporan	204.319.000,00	170.000,00	99,92%	
2	15	2	2.14	0001	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Dokumen Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek yang difasilitasi	3	Laporan	204.489.000	3	Laporan	204.319.000,00	170.000,00	99,92%	
2	15	3			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pengelolaan Pelayaran	20,12	Persen	696.062.000	20,12	Persen	448.444.668,00	247.617.332,00	64,43%	



KODE					URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OTTPUT)	SESUDAH PERUBAHAN						SISA PAGU	PERSEN TASE	KET
							TARGET			REALISASI					
							KINERJA		Rp.	KINERJA		Rp			
							Volume	Satuan		Volume	Satuan				
2	15	3	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang dibangun, diterbitkan Izin Pembangunan dan Pengoperasian	20,122	Persen	696.062.000	20	Persen	448.444.668,00	247.617.332,00	64,43%	
2	15	3	2.12	0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	5	Unit	562.462.000	3	Unit	315.937.168,00	246.524.832,00	56,17%	
2	15	3	2.12	0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang beroperasi dan diawasi	6	Laporan	133.600.000	6	Laporan	132.507.500,00	1.092.500,00	99,18%	
									10.090.960.757			8.754.850.190,00	1.336.110.567,00	86,76%	

Dari table diatas terlihat bahwa terjadi perubahan nilai pagu anggaran Renja Dinas Perhubungan pada Tahun 2023 Terhadap Renja DPA 2023 untuk pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan.



2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Secara umum dapat dikatakan bahwa pencapaian kinerja pelayanan SKPD yang ditetapkan berdasarkan Renstra 2023 – 2026 yang mengacu pada Indikator Kinerja RPJMD, Indikator Kinerja Utama (IKU), SPM maka terlihat jelas bahwa ada perkembangan yang cukup signifikan. Adapun pencapaian kinerja pelayanan SKPD Tahun 2019 dan 2020, serta proyeksi Tahun 2021, diperlihatkan dalam tabel berikut ini



Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah Periode 2023 -2026

No.	INDIKATOR SASARAN	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal	Target Tahun dan Realisasi							Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	KETERANGAN
			2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Target 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PERHUBUNGAN												
7.	Rasio performansi transportasi umum	-	0,2792	0,2792	27,20	0,30		0,35		0,40	0,40	
1.	Prosentase Layanan Angkutan Darat	%	0,0021	0,0021	0,00288	0,0022		0,0022		0,0022	0,0022	
	Jumlah Angkutan Darat	Buah	811	851	844	900		945		1000	1000	Pertumbuhan Kendaraan Angk. Umum 5 % per tahun
	Jumlah Penumpang Angkutan Darat	org/Tahun	377.500	396.376	292.986	416.194		424.583		445.812	445.812	
2	Rasio Ijin Trayek	Rasio	0,0019	0,0019	0,0019	0,0018		0,0018		0,0018	0,0018	
	Jumlah Izin Trayek Yang Dikeluarkan	bh	811	851	844	795		835		877	877	Pertumbuhan Kendaraan Angk. Orang dan barang 5 % per tahun
	Jumlah Penduduk	jiwa	427.052	436.092	436.092	440.848		462.890		486.035	486.035	
3	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	Rasio	0,0335	0,0318	0,0322	0,0285		0,0148		0,0144	0,0144	
	Panjang Jalan Seluruhnya	Km	987,05	987,75	987,75	972,55		990,39		1000	1000	Asumsi pertumbuhan kend. 0,8 % per tahun
	Jumlah kendaraan	unit	29.414	31.000	30.614	34.100		66.167		69.475	69.475	Asumsi pertumbuhan kend. 5 % per tahun
4	Persentase orang/barang yang terangkut Angkutan Umum	%	0, 21	0, 21	0, 288	0, 22		0, 22		0, 22	0,22	
	Jumlah Kendaraan Angkutan umum	Unit	811	851	844	900		945		1000	1000	
	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	org/Tahun	377.500	396.376	292.986	416.194		424.583		445.812	445.812	



No.	INDIKATOR SASARAN	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal	Target Tahun dan Realisasi							Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	KETERANGAN
			2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Target 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Persentase Pemasangan rambu-rambu lalu lintas	%	66,00	66,67	66,67	73,33		83,33		100,00	100,00	
	Jumlah Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas Pada Tahun n	buah	990,0	1000	990,0	1100		1250		1500	1500	
	Jumlah Rambu-rambu yang Seharusnya Terpasang	buah	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0		1500,0		1.500	1500,0	
6	Prosentase Kepemilikan KIR angkutan umum	%	67,51	67,51	31,84	67,51		67,5		67,51	67,51	
	Jumlah Angkutan Umum Yang Memiliki KIR pada Tahun n	unit	1.984	2.024	1.008	2.067		2.170		2.500	2.500	Target Kendaraan Yang akan diuji dalam 5 tahun adalah 3500 unit
	Jumlah Angkutan Umum Pada Tahun n	Unit	3.150	3.165	3165	3.175		3.180		3.189	3.189	
7.	Prosentase kecukupan sarana, prasarana/fasilitas infrastruktur transportasi	%	74,28	74,29	75,23	100,00		90,4		97,14	97,14	
	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus	Buah	78,0	78,0	79,0	87,6		95,0		102,0	102,0	
	Jumlah Pelabuhan Laut	Buah	13,0	13,0	13,0	14,0		15,0		15,0	15,0	
	Jumlah Bandar Udara	Buah	3,0	3,0	3,0	3,0		3,0		3,0	3,0	
	Jumlah Terminal Angkutan Darat Tipe C	Buah	6,0	6,0	7,0	9,0		9,0		8,0	8,0	
	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan	Buah	7,0	7,0	7,0	11,0		8,0		9,0	9,0	
	Jumlah Tambatan Perahu	Buah	49,0	49,0	49,0	55,0		60,0		67,0	67,0	
	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus, yang direncanakan	Buah	105,0	105,0	105,0	105,0		105,0		105,0	105,0	
	Jumlah Pelabuhan Laut	Buah	15,0	15,0	15,0	15,0		15,0		15,0	15,0	
	Jumlah Bandar Udara	Buah	3,0	3,0	3,0	3,0		3,0		3,0	3,0	



No.	INDIKATOR SASARAN	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal	Target Tahun dan Realisasi							Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	KETERANGAN
			2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Target 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Terminal Angkutan Darat Tipe C	Buah	9,0	9,0	9,0	9,0		9,0		9,0	9,0	
	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan	Buah	11,0	11,0	11,0	11,0		11,0		11,0	11,0	
	Jumlah Tambatan Perahu	Buah	67,0	67,0	67,0	67,0		67,0		67,0	67,0	
8	Hasil Penilaian Dokumen SAKIP OPD	-	B	B	B	BB		BB		A	A	
9	Cakupan Pegawai Berkualifikasi Teknis	%	35,71	15,71	12,50	40,68		46,42		53,57	53,57	
	Jumlah Pegawai yang berkualifikasi teknis yang ada	org	20,0	20,0	7,0	24,0		26,0		30,0	30,0	
	Jumlah Kebutuhan Pegawai Berkualifikasi Teknis	org	56,0	56,0	56,0	56,0		56,0		56,0	56,0	



2.3. ISU-ISU PENTING PELAKSANAAN TUGAS FUNGSI SKPD

Berdasarkan identifikasi permasalahan, faktor-faktor yang mempengaruhi baik secara internal maupun eksternal, faktor penghambat dan pendorong pelayanan kinerja OPD Dinas Perhubungan dengan mempertimbangkan antara lain :

1. Isu Strategis Global

A. Sustainable Development Goals (SDG's)

Bila pada Millenium Development Goals (MDG's) terdapat 8 sasaran dan 60 target maka pada Sustainable Development Goals ini terdapat 17 sasaran dan 169 target pembangunan. 17 sasaran tersebut terdiri dari:

1. Mengentaskan kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana.
2. Mengatasi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi dan mengembangkan pertanian berkelanjutan.
3. Memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua pada segala usia.
4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan.
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan atas air dan sanitasi untuk semua.
7. Menjamin akses ke energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan dan modern untuk semua.
8. Meningkatkan secara berkelanjutan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif serta meningkatkan secara berkelanjutan pekerjaan penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan menggiatkan inovasi.
10. Mengurangi ketimpangan antar negara.
11. Membuat kota dan permukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
12. Memastikan pola konsumsi dan pola produksi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Konservasi dan penggunaan berkelanjutan sumberdaya samudera dan kepebisiran untuk pembangunan yang berkelanjutan.
15. Melindungi, mengembalikan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem darat, pengelolaan hutan secara lestari, memerangi dan menghentikan



proses penggurunan, memulihkan degradasi lahan dan menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

16. Meningkatkan ketenteraman masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberi akses keadilan bagi semua dan dibangun lembaga yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan.

B. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah bentuk integrasi ekonomi negara-negara yang tergabung dalam ASEAN sehingga pada prakteknya terbentuk sistem perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN. MEA ini telah disepakati oleh negara-negara di ASEAN dan mulai diberlakukan pada tanggal 31 Desember 2015. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan membentuk ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal sehingga ASEAN akan bersifat lebih dinamis dan kompetitif dengan mekanisme dan langkah-langkah untuk memperkuat pelaksanaan baru yang menerapkan inisiatif ekonomi; mempercepat integrasi regional di sektor-sektor prioritas; memfasilitasi pergerakan bisnis, tenaga kerja terampil dan bakat; dan memperkuat kelembagaan mekanisme ASEAN.

Karakteristik utama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah:

- a. Pasar dan basis produksi tunggal.
- b. Kawasan ekonomi yang kompetitif.
- c. Wilayah pembangunan ekonomi yang merata.
- d. Daerah terintegrasi penuh dalam ekonomi global.

Masyarakat Ekonomi ASEAN ini memiliki beberapa dampak positif, diantaranya:

- a. Masyarakat Ekonomi ASEAN akan mendorong arus investasi dari luar masuk ke dalam negeri yang akan menciptakan multiplier effect dalam berbagai sektor khususnya dalam bidang pembangunan ekonomi.
- b. Kondisi pasar yang satu (pasar tunggal) membuat kemudahan dalam hal pembentukan joint venture (kerjasama) antara perusahaan-perusahaan di wilayah ASEAN sehingga akses terhadap bahan produksi semakin mudah.
- c. Pasar Asia Tenggara merupakan pasar besar yang begitu potensial dan juga menjanjikan dengan luas wilayah sekitar 4,5 juta kilometer persegi dan jumlah penduduk yang mencapai 600 juta jiwa.



- d. MEA memberikan peluang kepada negara-negara anggota ASEAN dalam hal meningkatkan kecepatan perpindahan sumber daya manusia dan modal yang merupakan dua faktor produksi yang sangat penting.
- e. Khusus untuk bidang teknologi, diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN ini menciptakan adanya transfer teknologi dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang yang ada di wilayah Asia Tenggara.

2. Isu Strategis Nasional

Isu-isu strategis Nasional yang patut menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra OPD antara lain :

1. Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
2. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan
3. Penegakan Pilar Demokrasi
4. Penegakkan Hukum Dan Pemberantasan Korupsi
5. Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan

3. Isu Strategis Kebijakan Pemerintah Provinsi

1. Tata kelola pemerintahan dan manajemen keuangan daerah belum efektif dan efisien.
2. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.
3. Terbatasnya infrastruktur dasar.
4. Belum optimalnya pelayanan pendidikan.
5. Belum optimalnya pelayanan kesehatan.
6. Masih rendahnya ketahanan pangan daerah.
7. Belum optimalnya iklim usaha dan investasi.
8. Belum berkembangnya budaya kreativitas, inovasi, ekonomi kreatif dan teknologi.
9. Rendahnya daya saing ekonomi daerah dan komoditas unggulan daerah.
10. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, pengelolaan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana serta daya dukung pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan.
11. Tingginya ketimpangan antar wilayah.
12. Belum optimalnya aktualisasi nilai-nilai kehidupan umat beragama.
13. Belum sinerginya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.



4. Isu Strategis Kebijakan Kabupaten Maluku Tengah

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Maluku Tengah 2018 – 2022, maka isu-isu strategis Kabupaten Maluku Tengah yang wajib menjadi acuan dalam perencanaan strategis OPD, antara lain :

1. Maluku Tengah sebagai Kabupaten Tertinggal

Kondisi ketertinggalan di Kabupaten Maluku Tengah dapat ditunjukkan dengan Indeks Desa Membangun atau disebut dengan IDM. IDM merupakan alat bantu “Teknokrasi” untuk mengukur perkembangan status kemandirian desa yang didalamnya memiliki ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. IDM mengklasifikasikan desa dalam 5 status yaitu : 1) Desa Sangat Tertinggal; (2) Desa Tertinggal; (3) Desa Berkembang; (4) Desa Maju dan (5) Desa mandiri.

Kabupaten Maluku Tengah, memiliki 18 Desa sangat tertinggal, 107 Desa Tertinggal, 57 Desa Berkembang, dan 4 Desa maju. Klasifikasi status Desa berdasar Indeks Desa Membangun ini juga diarahkan untuk memperkuat upaya memfasilitasi dukungan terhadap kemajuan Desa menuju Desa Mandiri, Desa Berkembang, dan terutama Desa Maju. Kemampuan mengelola Daya dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan akan membawa desa menjadi Desa Mandiri.

Pemerintah daerah berkewajiban membawa kabupaten ini keluar dari ketertinggalan dengan memanfaatkan semua potensi yang dimiliki, melakukan pembenahan dan intervensi terhadap penyebab utama ketertinggalan sehingga dapat sejajar dengan kabupaten maju lainnya.

2. Pertumbuhan ekonomi daerah masih rendah, belum berdaya saing, kurang kokoh dan belum pro rakyat

Perekonomian daerah Kabupaten Maluku Tengah terus berkembang dengan laju pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi selama lima tahun terakhir. Disamping memperlihatkan pola yang berfluktuasi, pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Maluku Tengah juga masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku dan Nasional. Rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah terutama terkait dengan rendahnya daya saing industri, Koperasi dan UKM, rendahnya daya tarik pariwisata, terbatasnya investasi dan ekspor, serta belum optimalnya pengelolaan komoditi unggulan daerah Kabupaten Maluku Tengah. Disamping itu, sarana dan prasarana penunjang produktivitas diberbagai sector ekonomi masih belum efektif, hal ini berbanding lurus dengan pemasaran produksi yang juga



masih belum optimal. Pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan sangat terkait dengan meningkatnya daya saing perekonomian daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah akan terus memacu peningkatan daya saing daerah dengan mendorong pengembangan industri berbasis komoditas unggulan daerah dengan menumbuhkan klaster-klaster industri, baik untuk meningkatkan keterkaitan antara industri hulu dan hilir, maupun antara pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah penyangganya.

Untuk meningkatkan kapasitas pertumbuhan ekonomi dan stabilitas perekonomian daerah, maka pemerintah Kabupaten Maluku Tengah akan memperkuat struktur perekonomian daerah dengan mengembangkan industri unggulan untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi yang akan difokuskan pada sektor pertanian terutama perkebunan, kelautan dan perikanan, serta pariwisata, dengan memacu pada peningkatan investasi, peningkatan daya saing Industri pengolahan dan perdagangan, serta penguatan kelembagaan UKM dan Koperasi.

3. Kemiskinan dan Pengangguran

Kemiskinan dan Pengangguran telah menjadi masalah utama pembangunan nasional dan daerah. Tingkat kemiskinan dan pengangguran telah berhasil diturunkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah selama lima tahun terakhir, namun masih relatif tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan dan pengangguran rata-rata Provinsi dan Nasional.

Jika dilihat dari penyebabnya, kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Maluku Tengah bervariasi dapat berupa Rendahnya pendapatan masyarakat karena tingginya angka kelahiran dari keluarga miskin, keterbatasan kepemilikan sumberdaya, rendahnya ketrampilan kerja, pendidikan yang tidak memenuhi kualifikasi pasar kerja, dan rendahnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Selain itu, evaluasi terhadap program penanggulangan kemiskinan juga dibutuhkan untuk melihat efektivitas program yang ada selama ini telah tepat sasaran. Penanggulangan kemiskinan yang tidak tepat sasaran akan justru memperparah kemiskinan dengan meningkatnya disparitas pendapatan. Rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah berakibat pada rendahnya penciptaan kesempatan kerja. Untuk itu, upaya penurunan pengangguran akan dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja formal, terutama didorong melalui percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi, dengan mempercepat pembangunan di bidang industri, perikanan, pertanian tanaman pangan, perkebunan dan pariwisata. Agar pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak hanya akibat perubahan kondisi makro namun terbangun dari kapasitas ekonomi masyarakat (sector riil).



4. Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Reformasi Birokrasi merupakan prasyarat utama tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih. Reformasi birokrasi merupakan pintu masuk seluruh elemen pemerintah dalam memanfaatkan peluang yang ada dengan pendekatan pembangunan yang inovatif secara substansial. Pelayanan publik yang berkualitas akan berdampak pada Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan diyakini sangat berkorelasi dengan reformasi birokrasi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Sejalan dengan dilaksanakannya desentralisasi dan otonomi daerah, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih hasilnya pun telah dirasakan. Namun, masih banyak hal yang harus diselesaikan lebih lanjut.

Dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, masih ditemukan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah belum optimal, sistem pengawasan internal belum optimal, kapasitas perencanaan pembangunan daerah belum optimal, Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah, sebahagian besar negeri di Kabupaten Maluku Tengah masih tergolong sangat tertinggal, serta kapasitas SDM dan kelembagaan di tingkat negeri masih terbatas.

Dari sisi pelayanan publik, dirasakan bahwa belum optimalnya kualitas pelayanan publik, kualitas dan Kapasitas aparatur pemerintah belum optimal, serta belum maksimalnya tata kelola pemerintahan berbasis e-Governance. Belum semua OPD menerapkan standar pelayanan yang cepat, murah, transparan, dan akuntabel.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah untuk lima tahun kedepan akan terus memperkuat reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, melalui peningkatan pengawasan internal, pembenahan manajemen pelayanan publik, dan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Kondisi yang diharapkan dari Upaya ini antara lain adalah : meningkatnya akuntabilitas pemerintahan, terwujudnya aparatur sipil negara yang profesional, disiplin dan memenuhi standar kompetensi, meningkatnya kualitas pelayanan publik, terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis e-Governance, serta meningkatnya kemajuan dan kemandirian negeri.

5. Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana wilayah masih terbatas

Sarana dan prasarana memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah terutama dalam penyediaan jaringan distribusi, sumber



energi, dan input produksi lainnya. Jaringan transportasi serta jaringan komunikasi dan informatika merupakan fasilitas yang menghubungkan sumber-sumber produksi, pasar dan para konsumen, yang secara sosial juga merupakan bagian dari ruang publik yang dapat digunakan untuk melakukan sosialisasi antar kelompok masyarakat guna mengartikulasikan diri dan membangun ikatan sosial-budaya.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai berfungsi sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi, ditunjukkan pada peran transportasi yang dapat memungkinkan orang, barang, dan jasa diangkut dari satu tempat ke tempat lain, serta peran jaringan komunikasi dan informatika yang memungkinkan pertukaran informasi secara cepat. Peranannya sangat penting, baik dalam proses produksi maupun dalam menunjang distribusi komoditi ekonomi dan ekspor. Telekomunikasi, listrik, dan airpun merupakan elemen sangat penting dalam proses produksi dari sektor-sektor ekonomi, seperti perdagangan, industri, dan pertanian.

Kualitas sarana dan prasarana di Kabupaten Maluku Tengah masih belum memadai dan relatif terbatas pada beberapa wilayah sehingga belum optimal menopang aktivitas masyarakat, khususnya kegiatan ekonomi, serta belum menjadi faktor pendorong yang efektif dan efisien sebagai roda penggerak perekonomian daerah. Berkenaan dengan pembangunan sarana dan prasarana (infrastuktur) wilayah akan terus ditingkatkan dalam pembangunan daerah Kabupaten Maluku Tengah periode 2018 - 2022.

6. Kerukunan, Keharmonisan dan ketertiban masyarakat belum sepenuhnya terwujud dalam kehidupan masyarakat maluku tengah sebagai hidup orang basudara

Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Maluku Tengah umumnya sudah sangat stabil, dan secara keseluruhan sikap masyarakat untuk sangat mendukung terciptanya tertib sosial melalui upaya dan dukungan mewujudkan ketentraman dan ketertiban di Maluku Tengah. Namun demikian, gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat masih berpotensi untuk muncul di Maluku Tengah, yang ditandai dengan masih terjadinya sejumlah tindakan anarkis dan konflik sosial antar warga dan antar kelompok masyarakat di beberapa wilayah.

Kabupaten Maluku Tengah sebagai daerah kepulauan dengan sendirinya memiliki keragaman geografis yang membentuk komunitas-komunitas masyarakat yang tersegregasi berdasarkan pulau-pulau yang ada, dengan keragaman sosial dan budaya yang berbeda-beda pula. Secara demografis Maluku didiami pula beragam etnis baik dari Sulawesi, Jawa, Sumatra, dan daerah-daerah lainnya.



Pengalaman kita sebelumnya seperti berbagai gejolak dan konflik horisontal di wilayah Maluku Tengah, memberi pesan akan mulai rapuhnya ke-Bhinnekaan Tunggal Ika kita. Realitas konflik di Maluku Tengah memberikan catatan kepada kita bahwa, kalau kita tidak cerdas mengelola heterogenitas Negeri ini dengan saling mengisi dan memperkuat, maka pluralitas suku, agama, ras, dan golongan (budaya) bisa dimanfaatkan untuk menjadi faktor penyebab konflik atau kekerasan massal, merupakan pandangan yang tidak bisa terbantahkan.

Yang juga perlu diwaspadai adalah munculnya konflik sosial dengan penggunaan pola-pola atau modus-modus lama yang pernah dipakai pada konflik sosial Maluku 1999 melalui sentimen agama dan kelompok. pertikaian dan konflik antar warga dan kelompok masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah juga merupakan pertanda rendahnya saling percaya dan ketidak harmonisan di dalam kehidupan masyarakat.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah akan mendorong peningkatan rasa saling percaya dan harmoni antar kelompok dan golongan masyarakat sebagai faktor yang penting untuk menciptakan rasa aman dan damai, dan menjamin kelancaran dan keberhasilan pembangunan daerah. Pemerintah Daerah juga akan mendorong terciptanya rasa aman dan damai secara berkelanjutan, menyelesaikan pertikaian dan konflik antar warga dan kelompok masyarakat serta menyelesaikan berbagai kerugian yang dialami masyarakat akibat konflik tersebut.

Dalam era transparansi, dan proses demokratisasi serta tingkat kemajuan masyarakat yang makin tinggi, pergeseran nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat secara berangsur-angsur mengakibatkan timbulnya budaya atau kebiasaan hidup tidak tertib, dan tidak jarang masyarakat melakukan tindakan-tindakan dengan caranya sendiri. Penyaluran aspirasi dan tuntutan masyarakat masih sering dilakukan dan diselesaikan dengan cara-cara anarkis, baik pengrusakan atau pembakaran sarana umum perkantoran, pendidikan dan perumahan penduduk. Atas dasar itu, peningkatan kualitas demokrasi akan terus didorong oleh pemerintah daerah yang ditekankan pada peningkatan pendidikan politik masyarakat dan partisipasi politik masyarakat.

7. Masih rendahnya partisipasi perempuan dan pemuda dalam pembangunan serta rendahnya prestasi olahraga dan seni

Saat ini kiprah perempuan dan pemuda sangatlah diperlukan dalam pembangunan daerah. Peran perempuan saat ini memperlihatkan bahwa kaum perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama. terdapat suatu kenyataan bahwa



"beban" yang kini dihadapi oleh kaum perempuan amatlah berat. Adanya kasus-kasus seperti angka kematian ibu melahirkan atau masalah akses terhadap layanan kesehatan yang baik, angka buta huruf atau keterbelakangan dalam pendidikan, masalah kemiskinan dan kelangkaan lapangan pekerjaan bagi perempuan, sampai dengan masalah kekerasan yang kerap kali menimpa kaum perempuan, baik kekerasan dalam rumah tangga ataupun kekerasan lain di luar rumah.

Untuk itulah kaum perempuan hendaknya mengambil peran strategis dalam proses pembangunan, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Bung Karno, agar kaum perempuan ikut memastikan arah gerak negara, sehingga kaum perempuan mendapatkan hak dasarnya sebagai manusia yang mulia. Dengan keterlibatan kaum perempuan, maka kepentingan kaum perempuan akan lebih tersalurkan dan lebih dari itu, kebijakan-kebijakan yang muncul akan mencerminkan suatu kebijakan yang berorientasi pada kesetaraan dan keadilan gender.

Begitu pula dengan pemuda yang merupakan agen perubahan karena memiliki kemampuan serta kapasitas untuk menggerakkan beragam potensi di lingkungannya baik sosial, ekonomi maupun sumber daya alam. Pemuda juga merupakan pelopor kerukunan, yakni sebagai "jembatan" guna menghindari berbagai gesekan sosial yang terjadi di masyarakat. Tingginya gesekan sosial bahkan potensi konflik justru menjadikan masyarakat lebih rentan dan sulit untuk berkembang. Komponen pemuda juga bisa menjadi "motor penggerak" dalam menciptakan lapangan kerja baru yang kreatif serta inovatif. Untuk itulah peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas perempuan dan pemuda dalam penyelenggaraan pembangunan dan meningkatkan prestasi olahraga mutlak diperlukan.

Mengacu pada isu-isu strategis, global, nasional, provinsi dan Kabupaten Maluku Tengah serta mencermati analisis permasalahan umum pelayanan OPD, maka ada 6 (enam) isu penting yang menjadi dasar dalam penyusunan Renstra OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2018 - 2022, yakni :

1. Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana/fasilitas transportasi masih terbatas.
 2. Konektivitas dan aksesibilitas transportasi belum optimal.
 3. Kualitas pelayanan publik..
 4. Komitmen Kepala Daerah di Bidang Transportasi dan keterbatasan Anggaran APBD
 5. Tata Kelola Lahan Pembangunan Infrastruktur Transportasi.
 6. Kuantitas dan kualitas, kompetensi SDM.
-
1. **Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana/fasilitas transportasi masih terbatas.**



Ketersediaan prasarana/fasilitas infrastruktur transportasi di wilayah Kabupaten Maluku tengah masih kurang, untuk itu perlu dukungan pemerintah pusat, provinsi sangat diperlukan dalam menunjang percepatan pembangunan infrastruktur transportasi. Selain itu kesiapan pemerintah daerah dalam wujud kesanggupan perencanaan yang komprehensif, ketersediaan lahan, serta dukungan sumber daya yang mampu mengelola berbagai prasarana/fasilitas infrastruktur tersebut, disamping kualitas jaringan transportasi yang mampu mengakses seluruh wilayah Kabupaten Maluku Tengah, terutama untuk membuka keterisolasian dan terkoneksi dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sangat diperlukan. Hal ini perlu ditunjang dengan regulasi yang memadai yang mampu membangkitkan minat investasi di sektor transportasi, sehingga arus mobilisasi orang, barang/jasa semakin berkembang dan minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum (darat, laut, udara) pun turut meningkat

2. **Konektivitas dan aksesibilitas transportasi belum optimal.**

Sebagaimana diutrakan pada point 1 diatas bahwa keterbatasan sarana dan prasarana infrastruktur transportasi sangat berpengaruh pada upaya-upaya peningkatan konektivitas dan aksesibilitas transportasi dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah.

3. **Kualitas Pelayanan Publik.**

Sampai dengan tahun 2021, ternyata bahwa kualitas pelayanan publik di sektor transportasi belumlah optimal, karena itu perlu dilakukan optimalisasi pelayanan berupa perbaikan tata kelola dan manajemen administrasi perkantoran serta pengukatan kapasitas baik aparatur maupun sarana dan prasarana/fasilitas pendukung tugas-tugas aparatur.

4. **Komitmen Kepala Daerah dan Keterbatasan Anggaran APBD.**

Komitmen Kepala Daerah terhadap kebijakan-kebijakan penganggaran guna pembangunan dan pengembangan Sektor transportasi hingga saat ini belum signifikan, karena itu untuk 5 (tahun) kedepan diharapkan ada peningkatan, sehingga upaya-upaya mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD 2018 – 2022 dapat terwujud.

5. **Tata Kelola Lahan Pembangunan Infrastruktur Transportasi .**

Ketersediaan lahan pembangunan infrastruktur transportasi merupakan persyaratan mutlak yang menjadi tanggung jawan Pemerintah Kabupaten Kota apabila menginginkan pembiayaan pembangunan tersebut baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, karena itu maka langkah-langkah antisipasi harus dilakukan sedini mungkin sehingga tidak menjadi kendala pada saat proses pembangunan dilaksanakan.

6. **Kuantitas, Kualitas dan Kompetensi SDM.**

Terselenggaranya tugas pokok dan fungsi OPD secara baik sangat tergantung pada kesiapan SDM yang berkualitas, professional, memiliki integritas dan etos kerja yang tinggi merupakan



kunci yang dibutuhkan dalam meningkatkan kinerja pelayanan, karena itu upaya-upaya peningkatan SDM sangat diperlukan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Penyusunan RENJA SKPD yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah senantiasa berpedoman pada RKPD, hal ini disesuaikan dengan analisis kebutuhan yang ingin dicapai oleh SKPD. Kenyataan selama ini bahwa hampir semua program/kegiatan yang ada pada RENJA belum terakomodasi sesuai dengan ketersediaan pagu anggaran definitif yang dialokasikan. Khusus untuk Tahun Anggaran 2024 program kegiatan serta sub kegiatan yang terakomodir 100 % dari renstra transisi 2023 – 2026 dan khususnya rencana renstra 2024. Untuk mendapatkan Dokumen Renja SKPD yang baku maka sangat perlu disinergikan dengan Rancangan Awal RKPD yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah sehingga ada sinkronisasi program secara menyeluruh dan terpadu. Tabel berikut menunjukkan hasil Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2024 :



Tabel. 2.4.1.a
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024 Sebelum Perubahan				Sumber Dana	Catatan Penting	
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK			Jumlah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU/DAK
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah		19,15	Persen	13.636.050.000	0	13.636.050.000	DAU	
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Masohi	2	Dokumen/Laporan	225.000.000	0	225.000.000	DAU	
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Masohi	1	Dokumen	175.000.000	0	175.000.000	DAU	
2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Masohi	1	Laporan	50.000.000	0	50.000.000	DAU	
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Masohi	5	Dokumen/Laporan	6.275.000.000	0	6.275.000.000	DAU	
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Masohi	66	Orang/Bulan	6.000.000.000	0	6.000.000.000	DAU	
2	15	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Masohi	1	Dokumen	200.000.000	0	200.000.000	DAU	
2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Masohi	1	Laporan	25.000.000	0	25.000.000	DAU	
2	15	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Masohi	2	Laporan	50.000.000	0	50.000.000	DAU	
2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan barang milik daerah	Kota Masohi	3	Dokumen/Laporan	155.000.000	0	155.000.000	DAU	



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024 Sebelum Perubahan				Sumber Dana	Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK	Jumlah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU/DAK		
2 15 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Masohi	1 Dokumen	50.000.000	0	50.000.000	DAU	
2 15 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Masohi	1 Laporan	30.000.000	0	30.000.000	DAU	
2 15 01 2.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Masohi	1 Dokumen	75.000.000	0	75.000.000	DAU	
2 15 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/Laporan administrasi pendapatan daerah	Kota Masohi	14 Dokumen/Laporan	3.900.000.000	0	3.900.000.000	DAU	
2 15 01 2.04 01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Masohi	1 Dokumen	300.000.000	0	300.000.000	DAU	
2 15 01 2.04 02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Kota Masohi	2 Dokumen	500.000.000	0	500.000.000	DAU	
2 15 01 2.04 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Kota Masohi	1 Laporan	300.000.000	0	300.000.000	DAU	
2 15 01 2.04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Kota Masohi	1 Laporan	300.000.000	0	300.000.000	DAU	
2 15 01 2.04 05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Tersebar di 14 Fasilitas	14 Laporan	2.500.000.000	0	2.500.000.000	DAU	
2 15 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Masohi	26,43 Persen	611.050.000	0	611.050.000	DAU	
2 15 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Masohi	15 Unit	75.000.000	0	75.000.000	DAU	
2 15 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Masohi	2 Paket	200.000.000	0	200.000.000	DAU	
2 15 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Masohi	2 Dokumen	60.000.000	0	60.000.000	DAU	



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024 Sebelum Perubahan				Sumber Dana	Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK	Jumlah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU/DAK		
2 15 01 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Masohi	1 Dokumen	50.000.000	0	50.000.000	DAU	
2 15 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Masohi	1 Dokumen	50.000.000	0	50.000.000	DAU	
2 15 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jakarta, Palembang, Tegal, Bali, Makassar, Ambon	6 Orang	76.050.000	0	76.050.000	DAU	
2 15 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Masohi	50 Orang	100.000.000	0	100.000.000	DAU	
2 15 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	Tersebar	22,82	Persen	1.080.000.000	0	1.080.000.000	DAU
2 15 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersebar Di Fasilitas Perhubungan	1 Paket	50.000.000	0	50.000.000	DAU	
2 15 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Masohi	8 Paket	250.000.000	0	250.000.000	DAU	
2 15 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Masohi	1 Paket	50.000.000	0	50.000.000	DAU	
2 15 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Masohi	4 Paket	250.000.000	0	250.000.000	DAU	
2 15 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Masohi	2 Dokumen	30.000.000	0	30.000.000	DAU	
2 15 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersebar di 18 Kec. Dan Jakarta, Makassar, Ambon, Surabaya	2 Laporan	400.000.000	0	400.000.000	DAU	
2 15 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Masohi	1 Dokumen	50.000.000	0	50.000.000	DAU	
2 15 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Tersebar	13,00	Unit	690.000.000	0	690.000.000	DAU



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024 Sebelum Perubahan				Sumber Dana	Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK		
2 15 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Masohi	1	Unit	500.000.000	0	500.000.000	DAU
2 15 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Masohi	2	Unit	80.000.000	0	80.000.000	DAU
2 15 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Masohi	5	Unit	50.000.000	0	50.000.000	DAU
2 15 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Masohi	4	Unit	10.000.000	0	10.000.000	DAU
2 15 01 2.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Tersebar di 18 Kecamatan	1	Unit	50.000.000	0	50.000.000	DAU
2 15 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Masohi	4	Laporan	130.000.000	0	130.000.000	DAU
2 15 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Masohi	1	Laporan	5.000.000	0	5.000.000	DAU
2 15 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Masohi	1	Laporan	50.000.000	0	50.000.000	DAU
2 15 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Masohi	2	Laporan	75.000.000	0	75.000.000	DAU
2 15 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Tersebar	23,38	Persen	570.000.000	0	570.000.000	DAU
2 15 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Masohi	1	Unit	50.000.000	0	50.000.000	DAU
2 15 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Masohi	1	Unit	50.000.000	0	50.000.000	DAU
2 15 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Masohi	5	Unit	20.000.000	0	20.000.000	DAU
2 15 01 2.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Tersebar di 14 Fasilitas/14 Kecamatan	14	Unit	200.000.000	0	200.000.000	DAU



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024 Sebelum Perubahan				Sumber Dana	Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK	Jumlah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU/DAK		
2 15 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Masohi	1 Unit	250.000.000	0	250.000.000	DAU	
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penyelenggaraan Lalulintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)		21,37 Persen	12.215.000.000	5.300.000.000	17.515.000.000	DAU/DAK	
2 15 02 2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Indu Jaringan Trayek Transportasi Darat, Laut, penyeberangan dan Angkuatn perkotaan dan perdesaan	Tersebar	2 Dokumen	750.000.000	0	750.000.000	DAU	
2 15 02 2.01 01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tersebar	1 Dokumen	500.000.000	0	500.000.000	DAU	
2 15 02 2.01 02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Masohi	1 Dokumen	250.000.000	0	250.000.000	DAU	
2 15 02 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersebar	328 Unit	1.775.000.000	0	1.775.000.000	DAU	
2 15 02 2.02 01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Tersebar Di 18 Kecamatan	3 Unit	750.000.000	0	750.000.000	DAU	
2 15 02 2.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Tersebar Di 18 Kecamatan	317 Unit	875.000.000	0	875.000.000	DAU	
2 15 02 2.02 03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Tersebar Di 18 Kecamatan	5 Unit	50.000.000	0	50.000.000	DAU	
2 15 02 2.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Tersebar Di 18 Kecamatan	3 Unit	100.000.000	0	100.000.000	DAU	
2 15 02 2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Terminal Penumpang Tipe C		15,48 Persen	3.150.000.000	2.000.000.000	5.150.000.000	DAU/DAK	
2 15 02 2.03 01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	Tulehu,Masohi,TNS,Tehoru	4 Dokumen	1.000.000.000	0	1.000.000.000	DAU	



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024 Sebelum Perubahan				Sumber Dana	Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK		
2 15 02 2.03 03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	Masohi, TNS,Saparua, Tulehu	1	Unit	2.000.000.000	2.000.000.000	4.000.000.000	DAU/DAK
2 15 02 2.03 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Masohi, TNS,Saparua, Tulehu	4	Unit	100.000.000	0	100.000.000	DAU
2 15 02 2.03 05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Tersebar di Dan Jakarta, Makassar, Ambon, Surabaya	2	Orang	50.000.000	0	50.000.000	DAU
2 15 02 2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Dokumen/Laporan Ijin Fasilitas Farkir		4	Dokumen/Laporan	130.000.000	0	130.000.000	DAU
2 15 02 2.04 01	Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersebar di 18 Kecamatan	2	Dokumen	30.000.000	0	30.000.000	DAU
2 15 02 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersebar di 18 Kecamatan	2	Laporan	100.000.000	0	100.000.000	DAU
2 15 02 2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor yang di uji Berkala		27,71	Persen	2.860.000.000	2.250.000.000	5.110.000.000	DAU/DAK
2 15 02 2.05 01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Kecamatan Amahai	1	Unit	1.000.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000	DAU/DAK
2 15 02 2.05 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Tersebar di 18 Kec. Dan Jakarta, Makassar, Ambon, Surabaya	3	Orang	60.000.000	0	60.000.000	DAU
2 15 02 2.05 03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Kota Masohi	1	Unit	60.000.000	0	60.000.000	DAU
2 15 02 2.05 04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Masohi	1	Dokumen	150.000.000	0	150.000.000	DAU



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024 Sebelum Perubahan				Sumber Dana	Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK	Jumlah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU/DAK		
2 15 02 2.05 05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersebar di 18 Kecamatan	1	Laporan	50.000.000	0	50.000.000	DAU
2 15 02 2.05 06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Tersebar di 18 Kecamatan	1	Laporan	50.000.000	0	50.000.000	DAU
2 15 02 2.05 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Kecamatan Amahai	1	Unit	1.250.000.000	1.250.000.000	2.500.000.000	DAU/DAK
2 15 02 2.05 08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersebar di 18 Kecamatan	1	Laporan	120.000.000	0	120.000.000	DAU
2 15 02 2.05 09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersebar di 18 Kecamatan	1	Laporan	60.000.000	0	60.000.000	DAU
2 15 02 2.05 10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersebar di 18 Kecamatan	1	Laporan	60.000.000	0	60.000.000	DAU
2 15 02 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan		25,00	Persen	400.000.000	0	400.000.000	DAU
2 15 02 2.06 01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Tersebar di 18 Kecamatan	1	Laporan	100.000.000	0	100.000.000	DAU
2 15 02 2.06 02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Tersebar di 18 Kecamatan	5	Unit	100.000.000	0	100.000.000	DAU
2 15 02 2.06 05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Masohi	1	Laporan	200.000.000	0	200.000.000	DAU
2 15 02 2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		7	Laporan	400.000.000	0	400.000.000	DAU



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024 Sebelum Perubahan				Sumber Dana	Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK		
2 15 02 2.08 01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Pegawai Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Tersebar di 18 Kec. Dan Jakarta, Makassar, Ambon, Surabaya	2	Orang	50.000.000	0	50.000.000	DAU
2 15 02 2.08 02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kecamatan Amahai	1	Laporan	25.000.000	0	25.000.000	DAU
2 15 02 2.08 03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Kota Masohi, Kec. Tehoru, Kec. Amahai, Kec. Salahutu, Kec. TNS	3	Laporan	75.000.000	0	75.000.000	DAU
2 15 02 2.08 05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Tersebar 18 Kecamatan	1	Laporan	250.000.000	0	250.000.000	DAU
2 15 02 2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang yang disediakan		23,61	Unit	1.550.000.000	1.050.000.000	2.600.000.000	DAU/DAK
2 15 02 2.09 01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Tersebar 18 Kecamatan	7	Unit	1.050.000.000	1.050.000.000	2.100.000.000	DAU/DAK
2 15 02 2.09 02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		2	Laporan	500.000.000	0	500.000.000	DAU
2 15 02 2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan		3	Dokumen	350.000.000	-	350.000.000	DAU
2 15 02 2.11 01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Masohi	1		250.000.000	0	250.000.000	DAU



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024 Sebelum Perubahan				Sumber Dana	Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK	Jumlah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU/DAK		
2 15 02 2.10 02	Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	50.000.000	0	50.000.000	DAU	
2 15 02 2.10 03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	50.000.000	0	50.000.000	DAU	
2 15 02 2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang ditetapkan		1 Dokumen	300.000.000	0	300.000.000	DAU	
2 15 02 2.12 01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Masohi	1 Dokumen	250.000.000	0	250.000.000	DAU	
2 15 02 2.12 02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersebar di 18 Kecamatan	1 Dokumen	50.000.000	0	50.000.000	DAU	
2 15 02 2.13	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	50.000.000	0	50.000.000	DAU	
2 15 02 2.13 02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Masohi	1 Dokumen	50.000.000	0	50.000.000	DAU	
2 15 02 2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek		3 Laporan	500.000.000	0	500.000.000	DAU	



Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024 Sebelum Perubahan				Sumber Dana	Catatan Penting
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK	Jumlah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU/DAK		
					dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
2	15	02	2.14	01	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersebar Di 18 kecamatan	3	Laporan	500.000.000	0	500.000.000	DAU
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pengelolaan Pelayaran		27,95	Persen	12.165.000.000	7.900.000.000	20.065.000.000	DAU/DAK
2	15	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha		2	Dokumen/Laporan	100.000.000	0	100.000.000	DAU
2	15	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersebar	1	Dokumen	50.000.000	0	50.000.000	DAU
2	15	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersebar	1	Laporan	50.000.000	0	50.000.000	DAU
2	15	03	2.02		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan Atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan Atau Badan Usaha		2	Dokumen/Laporan	100.000.000	0	100.000.000	DAU



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024 Sebelum Perubahan				Sumber Dana	Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK		
2 15 03 2.02 01	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersebar	1	Dokumen	50.000.000	0	50.000.000	DAU
2 15 03 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersebar	1	Laporan	50.000.000	0	50.000.000	DAU
2 15 03 2.05	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai Dengan Domisili Badan Usaha	Jumlah Dokumen/Laporan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan		2	Dokumen/Laporan	100.000.000	0	100.000.000	DAU
2 15 03 2.05 01	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai Dengan Domisili Badan Usaha kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersebar	1	Dokumen	50.000.000	0	50.000.000	DAU
2 15 03 2.05 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersebar	1	Laporan	50.000.000	0	50.000.000	DAU
2 15 03 2.06	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau	Jumlah Dokumen/Laporan Lintasan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal pada jaringan jalur kereta api		2	Dokumen/Laporan	100.000.000	0	100.000.000	DAU



Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024 Sebelum Perubahan				Sumber Dana	Catatan Penting
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK	Jumlah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU/DAK		
					Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota								
2	15	03	2.06	01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen, Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar	1	Dokumen	50.000.000	0	50.000.000	DAU
2	15	03	2.06	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar	1	Laporan	50.000.000	0	50.000.000	DAU
2	15	03	2.07		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan lintasan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan		2	Dokumen/Laporan	100.000.000	0	100.000.000	DAU
2	15	03	2.07	01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen, Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar	1	Dokumen	50.000.000	0	50.000.000	DAU



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024 Sebelum Perubahan				Sumber Dana	Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK		
2 15 03 2.07 02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar	1	Laporan	50.000.000	0	50.000.000	DAU
2 15 03 2.08	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Jumlah Dokumen/Laporan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal		2	Dokumen/Laporan	100.000.000	0	100.000.000	DAU
2 15 03 2.08 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersebar	1	Dokumen	50.000.000	0	50.000.000	DAU
2 15 03 2.08 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Tersebar	1	Laporan	50.000.000	0	50.000.000	DAU
2 15 03 2.09	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan		3	Dokumen/Laporan	150.000.000	0	150.000.000	DAU
2 15 03 2.09 01	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar	1	Dokumen	50.000.000	0	50.000.000	DAU



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024 Sebelum Perubahan				Sumber Dana	Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK		
2 15 03 2.09 02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen, Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Tersebar</i>	1	Laporan	50.000.000	0	50.000.000	DAU
2 15 03 2.09 03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Tersebar</i>	1	Laporan	50.000.000	0	50.000.000	DAU
2 15 03 2.10	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen/Laporan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal yang ditetapkan		12	Dokumen/Laporan	1.020.000.000	0	1.020.000.000	DAU
2 15 03 2.10 01	Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	<i>Kota Masohi, Salahutu, Seram Utara,Saparua,Nusalaut,P.Haruku</i>	2	Dokumen	700.000.000	0	700.000.000	DAU
2 15 03 2.10 02	Penetapan Kebijakan dan sosialisasi rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	<i>Kota Masohi, Salahutu, Seram Utara,Saparua,Nusalaut,P.Haruku</i>	2	Dokumen	200.000.000	0	200.000.000	DAU
2 15 03 2.10 03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	<i>Kota Masohi, Salahutu, Seram Utara,Saparua,Nusalaut,P.Haruku</i>	8	Laporan	120.000.000	0	120.000.000	DAU



Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024 Sebelum Perubahan				Sumber Dana	Catatan Penting
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK	Jumlah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU/DAK	
2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Pelabuhan Pengumpan Lokal yang dibangun, diterbitkan Izin Pembangunan dan Pengoperasian		27,95	Persen	9.945.000.000	7.900.000.000	17.845.000.000	DAU/DAK
2	15	03	2.12	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terrsebar	1	Dokumen	25.000.000	0	25.000.000	DAU
2	15	03	2.12	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	Terrsebar	18	Unit	7.595.000.000	7.000.000.000	14.595.000.000	DAU/DAK
2	15	03	2.12	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Terrsebar	18	Unit	450.000.000	0	450.000.000	DAU
2	15	03	2.12	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terrsebar	14	Laporan	75.000.000	0	75.000.000	DAU
2	15	03	2.12	05	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutanpelabuhan Pengumpan lokal	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia	Terrsebar	3	Unit	1.800.000.000	900.000.000	2.700.000.000	DAU/DAK
2	15	03	2.14		Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen/Laporan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal		2	Dokumen/Laporan	100.000.000	0	100.000.000	DAU
2	15	03	2.14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terrsebar	1	Dokumen	25.000.000	0	25.000.000	DAU
2	15	03	2.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dilaksanakan	Terrsebar	1	Laporan	75.000.000	0	75.000.000	DAU



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024 Sebelum Perubahan				Sumber Dana	Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK		
215032.15	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal		43,75	Persen	350.000.000	0	350.000.000	DAU
215032.1501	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dilaksanakan	Tersebar	1	Dokumen	25.000.000	0	25.000.000	DAU
215032.1502	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Tersebar	1	Laporan	25.000.000	0	25.000.000	DAU
215032.1503	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan pengumpan Lokal yang Tersedia	Kota Masohi	1	Unit	300.000.000	0	300.000.000	DAU
TOTAL JUMLAH PAGU 2024						38.016.050.000	13.200.000.000	51.216.050.000	



2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam Tahun Anggaran 2024, terlihat jelas hampir sebagian besar program /kegiatan yang merupakan usulan/aspirasi masyarakat yang tertampung baik melalui Musrenbang Desa, Kecamatan maupun melalui hasil jaring aspirasi masyarakat belum seluruhnya dapat diakomodir. Hal ini disebabkan karena :

1. Minimnya pagu anggaran definitif yang dialokasikan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2024.
2. Sebagian besar program/kegiatan yang diusulkan belum dilengkapi dokumen perencanaan secara teknis, sehingga tidak diketahui secara rinci volume dan besarnya kebutuhan riil anggaran yang diperlukan serta urgensinya.
3. Program kegiatan yang diusulkan bersifat temporer dan mengalami penurunan prioritas ketika dilakukan persandingan/sinergitas program dengan program/kegiatan RENJA SKPD.

Selain itu melalui hasil jaring aspirasi masyarakat yang harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah khususnya bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah, dan sepanjang usulan itu tidak bertentangan dengan RKPD dan Dokumen Renstra SKPD, maka hal tersebut menjadi catatan penting untuk dipertimbangkan dan diakomodir dalam Dokumen Renja SKPD.

Tabel berikut ini menjelaskan tentang usulan program kegiatan dari pemangku kepentingan dan masyarakat dari hasil jaring aspirasi maupun musrenbang desa dan kecamatan sebagai berikut :



Tabel 2.5.1.
Hasil Jaring Aspirasi Maupun Musrembang Negeri Dan Kecamatan Tahun 2019 – 2022

Kode					Program dan Kegiatan	Lokasi		Volume		Pagu	Sumber Dana	Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Dasar Usulan	KET
						Kecamatan	Negeri/Kelurahan			Rp.				
(4)					(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					1.200.000.000		DISHUB	DISHUB	
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersebar	Tersebar			200.000.000				
2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pulau Haruku	Neberi Kabauw	1	Unit	200.000.000	DAU/DAK		Musrembang Negeri Dan Kecamatan	Pembangunadan Pemasangan Gadrail
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					1.000.000.000				
2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Seram Utara Timur Seti dan Seram Utara Barat	Desa Waitila dan Negeri Salewang	2	Unit	1.000.000.000	DAU/DAK		Musrembang Negeri Dan Kecamatan	Pengadaan Transdes
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					3.400.000.000		DISHUB	DISHUB	
2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				Persen	3.400.000.000				
2	15	03	2.12	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Saparua dan Pulau Haruku	Negeri Saparua dan Negeri Kabauw	2	Unit	2.500.000.000	DAU/DAK		Musrembang Negeri Dan Kecamatan	Pembangunan Tambatan Perahu Negeri Saparua dan Rehabilitas Tambatan Perahu Negeri Kabauw
2	15	03	2.12	05	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	Leihitu	Negeri Assilulu	1	Unit	900.000.000	DAU/DAK		Musrembang Negeri Dan Kecamatan	Pengadaan Sped Boat Semenanjung Tanjung sial Kec Leihitu
TOTAL JUMLAH PAGU 2024										4.600.000.000				



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM/KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Transportasi, merupakan urat nadi kehidupan berbangsa dan bernegara, mempunyai fungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan. Selain itu transportasi juga merupakan suatu sistem yang terdiri dari sarana, prasarana yang didukung oleh tata laksana dan sumber daya manusia membentuk jaringan prasarana dan jaringan pelayanan. Banyak elemen yang terkait dalam sistem ini, baik sarana, prasarana maupun pergerakan.

Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh peran sektor transportasi, karenanya sistem transportasi Wilayah harus dibina agar mampu menghasilkan jasa yang handal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, mendukung mobilitas manusia, barang serta jasa, Kabupaten dan meningkatkan hubungan ke-Wilayahan dan Nasional yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka perwujudan bingkai persatuan Indonesia.

Memperhatikan Visi dan Misi Pemerintahan Jokowi – KH. Maruf Amin sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2019 – 2024, sesuai Perpres Nomor 2 Tahun 2019, ***“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***, dengan salah satu misinya adalah ***”Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan Nasional”*** yang kemudian diimplementasikan sebagaimana diwujudkan dalam program “Nawacita (3) yaitu : ***Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan dan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.*** Dengan salah satu isu prioritas RPJMN yakni : ***“Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan”***.

Berdasarkan arah kebijakan nasional dan provinsi di Bidang Perhubungan serta mencermati kondisi Kabupaten Maluku Tengah yang merupakan wilayah kepulauan mengakibatkan Kabupaten ini sangat memerlukan jasa perhubungan untuk dapat membangun wilayahnya, meskipun wilayah daratan yang akan dibangunnya hanya 8 % dari seluruh luas wilayahnya.



Dengan memandang kondisi eksisting perkembangan transportasi yang ada, maka Dinas Perhubungan selaku Instansi teknis harus memiliki visi untuk dapat membangun dan mengembangkan Kabupaten Maluku Tengah kearah yang lebih baik. Mengacu pada visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2018 – 2022, yakni :

“ Mewujudkan Maluku Tengah Yang lebih Maju, Sejahtera, Dan Berkeadilan Dalam Semangat Hidup Orang Basudara “

Maka Tujuan dan sasaran untuk mewujudkan Misi Ketiga RPJMD 2017 – 2022 yakni ***“Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana wilayah”***, maka ditetapkan tujuan dan sasaran antara lain :

Tujuan Pertama : Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas transportasi dengan sasaran :

1. *Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur transportasi yang menjamin konektivitas dan aksesibilitas wilayah.*

Selanjutnya Tujuan dan sasaran untuk mewujudkan Misi Empat RPJMD 2017 – 2022, yakni ***“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih”***, maka ditetapkan tujuan dan sasaran antara lain :

Tujuan Pertama : Meningkatkan Tata kelola pelayanan publik bidang perhubungan.

Dengan sasaran :

1. *Meningkatnya profesionalisme, kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah..*
2. *Meningkatnya ketersediaan data, informasi serta distribusi informasi pembangunan daerah yang turut memperkuat daya saing daerah dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat.*

Selengkapnya tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan yang ingin dicapai 5 (lima) tahun ke depan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah, diperlihatkan pada table berikut ini :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah



No	VISI	MISI	TUJUAN				SASARAN		Satuan	Tahun Dasar	TARGET KINERJA				
			URAIAN TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AWAL PERIODE	TARGET CAPAIAN AKHIR PERIODE	URAIAN SASARAN	INDIKATOR SASARAN		2022	2023	2024	2025	2026	Akhir
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	"Mewujudkan Maluku Tengah yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan."	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana wilayah	Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas transportasi	Rasio Dukungan Sarana dan Prasarana infrastruktur Transportasi untuk menunjang konektivitas dan aksesibilitas	0,9143	0,9626	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur transportasi yang menjamin konektivitas dan aksesibilitas wilayah.	Rasio Dukungan Sarana dan Prasarana infrastruktur Transportasi untuk menunjang konektivitas dan aksesibilitas	%	0.9143	0.9143	0.9159	0.9346	0.9626	0,9346
								Persentase kecukupan sarana, prasarana/fasilitas infrastruktur transportasi	%	91,43	91,43	91,59	93,46	96,26	96,26
								Persentase Performansi Transportasi Umum	%	27,92	27,92	30,00	35,00	40,00	40,00
		"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih"	Meningkatkan Tata kelola pelayanan publik bidang perhubungan	Predikat Penilaian Dokumen SAKIP OPD	B	A	Meningkatnya profesionalisme, kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah.	Nilai SAKIP	-	B	BB	BB	BB	A	A



4.2. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Secara umum arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua:

1. Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
2. Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Strategi dan arah kebijakan disusun dari serangkaian proses perencanaan strategik, yang dirumuskan dengan pertimbangan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus dihadapi selama 5 tahun kedepan. Strategi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada didalam lingkup ekologi (lingkungan). Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan strategi adalah analisa SWOT, sehingga rumusan strategi berikut ini merupakan hubungan yang saling berpengaruh antara kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

4.2.1 Strategi

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Untuk itu strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana OPD berupaya menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang inherent adalah dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang melekat pada

masing-masing isu. Identifikasi faktor internal dan eksternal, serta analisis SWOT sebagai berikut :

Tabel 4.2. Analisa SWOT

Faktor Eksternal Faktor Internal	<i>Peluang (Opportunities) :</i>	<i>Tantangan (Threats) :</i>
	1. Regulasi di Bidang transportasi 2. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain 3. Keinginan masyarakat akan angkutan umum yang aman, nyaman dan selamat. 4. Komitmen Kepala Daerah di bidang transportasi. 5. Peran swasta dan masyarakat. 6. Perkembangan teknologi informasi di bidang transportasi pada era globalisasi. 7. Dukungan Pengembangan transportasi oleh Pemerintah Pusat.	1. Regulasi tentang pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota. 2. Ketersediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur transportasi. 3. Prilaku/disiplin pengguna dan pemilik. 4. Minat investasi di sektor transportasi yang minim.
<i>Kekuatan (Strengths) :</i>	<i>Alternatif Strategi S-O :</i>	<i>Alternatif Strategi S-T :</i>
1. Jumlah SDM 2. Sarana prasarana penunjang operasional. 3. Regulasi operasional (Perda, Perbub, SK. Bupati, dll) 4. Pelayanan public di bidang perhubungan.	1. Mempercepat penyediaan infrastruktur perhubungan dalam rangka peningkatan konektivitas	1. Meningkatkan pelayanan transportasi perhubungan darat, laut dan udara
<i>Kelemahan (Weakness) :</i>	<i>Alternatif Strategi W-O :</i>	<i>Alternatif Strategi W-T :</i>
1. Keterbatasan alokasi anggaran APBD II. 2. Kualitas SDM yang berkompetensi khusus. 3. Dukungan dokumen perencanaan transportasi makro (Infrastruktur maupun jaringan).	1. Meningkatkan Pelayanan Administarsi Perkantoran 2. Meningkatkan kinerja pelayanan aparatur	1. Penyediaan dan peningkatan aksesibilitas pendukung transportasi perhubungan dalam rangka pertumbuhan ekonomi daerah.

Dari hasil analisa SWOT diatas diperoleh 4 (empat) strategi dalam upaya mengimplementasikan Visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPJMD, yang penjabarannya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.3. Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan Strategi

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	STRATEGI
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur transportasi yang menjamin konektivitas dan aksesibilitas wilayah	Persentase layanan angkutan darat	Mempercepat penyediaan infrastruktur perhubungan dalam rangka peningkatan konektivitas.
		Rasio Izin Trayek	Meningkatkan pelayanan transportasi perhubungan

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	STRATEGI
1	2	3	4
			darat, laut dan udara.
		Rasio panjang Jalan per jumlah kendaraan	
		Persentase orang/barang yang terangkut angkutan umum	
		Persentase Pemasangan Rambu-rambu lalu lintas	
		Persentase kepemilikan KIR Angkutan Umum	
		Persentase Ketersediaan Prasarana/fasilitas infrastruktur transportasi (darat, laut, udara dan penyeberangan)	Penyediaan dan peningkatan aksesibilitas pendukung transportasi perhubungan dalam rangka pertumbuhan ekonomi.
2.	Meningkatnya profesionalisme, kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah	Nilai LAKIP OPD	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
		Persentase Personil yang menunjang kinerja pelayanan OPD	Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur
3.	Meningkatnya ketersediaan data, informasi serta distribusi informasi pembangunan daerah yang turut memperkuat daya saing daerah dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat	Prosentase pelaksanaan distribusi data dan informasi pembangunan daerah melalui Pameran Pembangunan Daerah.	Mendorong peningkatan distribusi informasi tentang perkembangan sektor perhubungan yang mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah.

4.2.2 Kebijakan

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kebijakan adalah pedoman atau arah yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Selanjutnya Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dapat dilihat dalam table berikut ini :

Tabel 4.4. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2017 - 2022

VISI : “ Mewujudkan Maluku Tengah Yang lebih Maju, Sejahtera, Dan Berkeadilan Dalam Semangat Hidup Orang Basudara “			
MISI 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana wilayah.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas transportasi	1. Meningkatkan Ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur transportasi yang menjamin konektivitas dan aksesibilitas wilayah	1. Mempercepat penyediaan infrastruktur perhubungan dalam rangka peningkatan konektivitas dan aksesibilitas.	1. Meningkatkan ketersediaan rencana dan desain prasarana/fasilitas perhubungan. <i>(Program 2.15.02 dan Program 1.15.03)</i> Mendorong ketersediaan sarana, prasarana/fasilitas infrastruktur perhubungan. <i>(Program 2.15.02 dan Program 1.15.03)</i>
		2. Meningkatkan pelayanan transportasi	1. Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan yang



		perhubungan darat, laut dan udara.	mendukung kelancaran pergerakan orang maupun barang. (Program 2.15.02 dan Program 1.15.03) Meningkatkan kualitas prasarana/fasilitas keselamatan transportasi. (Program 2.15.02 dan Program 1.15.03) Meningkatkan kelaikan angkutan umum (darat, Laut dan Penyeberangan) sesuai standar keselamatan transportasi. (Program 2.15.02 dan Program 1.15.03)
		3. Penyediaan dan peningkatan aksesibilitas pendukung transportasi perhubungan dalam rangka pertumbuhan ekonomi.	Meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur perhubungan yang mendukung aksesibilitas transportasi. (Program 2.15.02 dan Program 1.15.03)
MISI 4 : “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih”			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Meningkatkan Tata kelola pelayanan publik bidang perhubungan	1. Meningkatnya profesionalisme, kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah	1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran. (Program 2.15.01) 2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur. (Program 2.15.01) 3. Meningkatkan kualitas pembinaan, pengembangan karier aparatur Dinas Perhubungan. (Program 2.15.01)
		2. Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur	Meningkatkan kualitas SDM bidang Perhubungan. (Program 2.15.01) Meningkatkan Disiplin dan etos kerja aparatur Dinas Perhubungan. (Program 2.15.01) Meningkatkan kualitas pengelolaan system administrasi keuangan dan capaian kinerja. (Program 2.15.01)
	2. Meningkatnya ketersediaan data, informasi serta distribusi informasi pembangunan daerah yang turut memperkuat daya saing daerah dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat.	1. Mendorong peningkatan distribusi informasi tentang perkembangan sektor perhubungan yang mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah	1. Meningkatkan upaya distribusi informasi terhadap kemajuan pembangunan sektor perhubungan. (Program 2.15.01)

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Mengacu pada Visi dan Misi, yang diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 serta RENSTRA Dinas 2017 – 2022 maupun RPJMD Kabupaten Maluku Tengah maka Tahun Anggaran 2017 – 2022, maka program-program Pembangunan Sektor Perhubungan direncanakan tetap berpedoman pada Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Kabupaten Maluku Tengah, sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga dan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan.
2. Peningkatan akses dan pelayanan KB serta menekan tingginya jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.
3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan investasi, melalui penyediaan sarana dan prasarana ekonomi.
4. Pengembangan sentra industri, agribisnis, mutu dan nilai tambah produk
5. Pemanfaatan ketahanan pangan dan menjaga ketersediaan stok dan distribusi bahan kebutuhan pokok.
6. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
7. Peningkatan derajat dan kesejahteraan keluarga miskin dalam mengurangi angka kemiskinan.
8. Peningkatan lapangan kerja baru dan SDM Tenaga Kerja.
9. **Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas sarana prasarana infrastruktur Transportasi (jalan, jembatan, pelabuhan) dan telematika**
10. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas sarana prasarana sumber daya air dan permukiman.
11. Meningkatkan pemanfaatan lingkungan secara bijaksana dengan memperhatikan aspek keharmonisan, daya guna, hasil guna, serta daur ulang.
12. Meningkatkan pemahaman mitigasi dan rehabilitasi untuk mengurangi resiko dan memulihkan dampak kerusakan yang diakibatkan oleh konflik dan bencana alam.
13. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
14. Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintah yang profesional, disiplin, dan berbasis merit sistem/ kompetensi.
15. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat memenuhi SPM (Standar pelayanan Minimal).
16. Peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan secara optimal.
17. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis e-Governance.
18. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan negeri dalam mewujudkan penyelenggaraan desa yang baik dan bersih.



19. Peningkatan perlindungan dan pengelolaan keragaman dan kekayaan budaya daerah.
20. Peningkatan even-even kesenian daerah dalam rangka meningkatkan promosi dan prestasi kesenian daerah di tingkat provinsi dan nasional.
21. Penguatan produk hukum daerah dan peningkatan pengawasan terhadap potensi konflik sosial di daerah.
22. Menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama.
23. Meningkatkan kesetaraan gender.
24. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
25. Peningkatan even-even olah raga dalam rangka meningkatkan prestasi olah raga tingkat provinsi dan nasional

Selain itu semua Program-program yang telah disusun ini didasarkan pada skala prioritas dengan tetap mempertimbangkan aspek kebutuhan dan jaringan aspirasi masyarakat.

Rencana pembiayaan program kerja ini diupayakan dari 1 (tiga) sumber Dana yakni :

1. APBD	Rp.	51.216.050,000,-
Jumlah Total	Rp.	51.216.050,000,-

Adapun rincian Program/Kegiatan serta sub kegiatan dapat dilihat pada tabel Matriks Rencana Program Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut ini :



Tabel. 3.3.1
RENCANA PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN OPD TAHUN ANGGARAN 2024 (Perubahan)

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024 Sebelum Perubahan				Pagu Penyesuaian (DAU) Rp.	Sumber Dana	Catatan Penting
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK	Jumlah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU/DAK		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	1	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah		19,15	Persen	13.636.050.000	0	13.636.050.000	7.390.665.626	DAU
2	1	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Masohi	2	Dokumen/Laporan	225.000.000	0	225.000.000	29.053.000	DAU
2	1	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Masohi	1	Dokumen	175.000.000	0	175.000.000	0	DAU
2	1	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Masohi	1	Laporan	50.000.000	0	50.000.000	29.053.000	DAU
2	1	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Masohi	5	Dokumen/Laporan	6.275.000.000	0	6.275.000.000	5.074.943.000	DAU
2	1	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Masohi	66	Orang/Bulan	6.000.000.000	0	6.000.000.000	4.865.693.000	DAU
2	1	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Masohi	1	Dokumen	200.000.000	0	200.000.000	201.600.000	DAU
2	1	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Masohi	1	Laporan	25.000.000	0	25.000.000	0	DAU
2	1	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Masohi	2	Laporan	50.000.000	0	50.000.000	7.650.000	DAU
2	1	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan barang milik daerah	Kota Masohi	3	Dokumen/Laporan	155.000.000	0	155.000.000	0	DAU
2	1	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Masohi	1	Dokumen	50.000.000	0	50.000.000		DAU



Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024 Sebelum Perubahan				Pagu Penyesuaian (DAU) Rp.	Sumber Dana	Catatan Penting
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK	Jumlah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU/DAK		
2	1	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Masohi	1	Laporan	30.000.000	0	30.000.000	0	DAU
2	1	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Masohi	1	Dokumen	75.000.000	0	75.000.000	0	DAU
2	1	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/Laporan administrasi pendapatan daerah	Kota Masohi	14	Dokumen/Laporan	3.900.000.000	0	3.900.000.000	1.156.641.000	DAU
2	1	01	2.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Masohi	1	Dokumen	300.000.000	0	300.000.000	0	DAU
2	1	01	2.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Kota Masohi	2	Dokumen	500.000.000	0	500.000.000	0	DAU
2	1	01	2.04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Kota Masohi	1	Laporan	300.000.000	0	300.000.000	0	DAU
2	1	01	2.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Kota Masohi	1	Laporan	300.000.000	0	300.000.000	0	DAU
2	1	01	2.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Tersebar di 14 Fasilitas	14	Laporan	2.500.000.000	0	2.500.000.000	1.156.641.000	DAU
2	1	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Masohi	26,43	Persen	611.050.000	0	611.050.000	20.000.000	DAU
2	1	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Masohi	15	Unit	75.000.000	0	75.000.000	0	DAU
2	1	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Masohi	2	Paket	200.000.000	0	200.000.000	0	DAU
2	1	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Masohi	2	Dokumen	60.000.000	0	60.000.000	20.000.000	DAU
2	1	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Masohi	1	Dokumen	50.000.000	0	50.000.000	0	DAU
2	1	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Masohi	1	Dokumen	50.000.000	0	50.000.000	0	DAU



Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024 Sebelum Perubahan					Pagu Penyesuaian (DAU) Rp.	Sumbe r Dana	Catata n Penting
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK	Jumlah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU/DAK			
2	1	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jakarta, Palembang, Tegal, Bali, Makssar, Ambon	6	Orang	76.050.000	0	76.050.000	0	DAU	
2	1	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Masohi	50	Orang	100.000.000	0	100.000.000	0	DAU	
2	1	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	Tersebar	22,82	Persen	1.080.000.000	0	1.080.000.000	726.145.850	DAU	
2	1	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersebar Di Fasilitas Perhubungan	1	Paket	50.000.000	0	50.000.000	0	DAU	
2	1	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Masohi	8	Paket	250.000.000	0	250.000.000	104.180.950	DAU	
2	1	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Masohi	1	Paket	50.000.000	0	50.000.000	0	DAU	
2	1	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Masohi	4	Paket	250.000.000	0	250.000.000	89.489.900	DAU	
2	1	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Masohi	2	Dokumen	30.000.000	0	30.000.000	14.875.000	DAU	
2	1	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersebar di 18 Kec. Dan Jakarta, Makassar, Ambon, Surabaya	2	Laporan	400.000.000	0	400.000.000	517.600.000	DAU	
2	1	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Masohi	1	Dokumen	50.000.000	0	50.000.000	0	DAU	
2	1	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Tersebar	13,00	Unit	690.000.000	0	690.000.000	0	DAU	
2	1	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Masohi	1	Unit	500.000.000	0	500.000.000	0	DAU	



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024 Sebelum Perubahan				Pagu Penyesuaian (DAU) Rp.	Sumber Dana	Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK	Jumlah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU/DAK			
2.1.5.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Masohi	2 Unit	80.000.000	0	80.000.000	00	DAU	
2.1.5.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Masohi	5 Unit	50.000.000	0	50.000.000	0	DAU	
2.1.5.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Masohi	4 Unit	10.000.000	0	10.000.000	0	DAU	
2.1.5.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Tersebar di 18 Kecamatan	1 Unit	50.000.000	0	50.000.000	0	DAU	
2.1.5.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Masohi	4 Laporan	130.000.000	0	130.000.000	99.340.000	DAU	
2.1.5.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Masohi	1 Laporan	5.000.000	0	5.000.000	3.300.000	DAU	
2.1.5.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Masohi	1 Laporan	50.000.000	0	50.000.000	24.650.000	DAU	
2.1.5.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Masohi	2 Laporan	75.000.000	0	75.000.000	71.390.000	DAU	
2.1.5.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Tersebar	23,38 Persen	570.000.000	0	570.000.000	284.542.776	DAU	
2.1.5.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Masohi	1 Unit	50.000.000	0	50.000.000	75.521.000	DAU	
2.1.5.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Masohi	1 Unit	50.000.000	0	50.000.000	0	DAU	
2.1.5.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Masohi	5 Unit	20.000.000	0	20.000.000	9.000.000	DAU	
2.1.5.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Tersebar di 14 Fasilitas/14 Kecamatan	14 Unit	200.000.000	0	200.000.000	79.560.000	DAU	
2.1.5.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Masohi	1 Unit	250.000.000	0	250.000.000	120.461.776	DAU	



Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024 Sebelum Perubahan				Pagu Penyesuaian (DAU) Rp.	Sumber Dana	Catatan Penting
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK	Jumlah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU/DAK		
2	1	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penyelenggaraan Lalulintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)		21,37	Persen	12.215.000.000	5.300.000.000	17.515.000.000		DAU/D AK
2	1	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan Trayek Transportasi Darat, Laut, penyeberangan dan Angkutan perkotaan dan perdesaan	Tersebar	2	Dokumen	750.000.000	0	750.000.000	0	DAU
2	1	02	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tersebar	1	Dokumen	500.000.000	0	500.000.000	0	DAU
2	1	02	2.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Masohi	1	Dokumen	250.000.000	0	250.000.000	0	DAU
2	1	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersebar	328	Unit	1.775.000.000	0	1.775.000.000	15.870.000	DAU
2	1	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Tersebar Di 18 Kecamatan	3	Unit	750.000.000	0	750.000.000	0	DAU
2	1	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Tersebar Di 18 Kecamatan	317	Unit	875.000.000	0	875.000.000	0	DAU
2	1	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Tersebar Di 18 Kecamatan	5	Unit	50.000.000	0	50.000.000	7.200.000	DAU
2	1	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Tersebar Di 18 Kecamatan	3	Unit	100.000.000	0	100.000.000	8.670.000	DAU
2	1	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Terminal Penumpang Tipe C		15,48	Persen	3.150.000.000	2.000.000.000	5.150.000.000	0	DAU/D AK
2	1	02	2.03	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	Tulehu, Masohi, TNS, Tehoru	4	Dokumen	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	DAU
2	1	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	Masohi, TNS, Saparua, Tulehu	1	Unit	2.000.000.000	2.000.000.000	4.000.000.000	0	DAU/D AK
2	1	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Masohi, TNS, Saparua, Tulehu	4	Unit	100.000.000	0	100.000.000	0	DAU
2	1	02	2.03	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Tersebar di Dan Jakarta,	2	Orang	50.000.000	0	50.000.000	0	DAU



Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024 Sebelum Perubahan				Pagu Penyesuaian (DAU) Rp.	Sumber Dana	Catatan Penting
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK	Jumlah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU/DAK		
							<i>Makassar, Ambon, Surabaya</i>							
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Dokumen/Laporan Ijin Fasilitas Parkir		4	Dokumen/Laporan	130.000.000	0	130.000.000	0	DAU
2	15	02	2.04	01	Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	<i>Tersebar di 18 Kecamatan</i>	2	Dokumen	30.000.000	0	30.000.000	0	DAU
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Tersebar di 18 Kecamatan</i>	2	Laporan	100.000.000	0	100.000.000	0	DAU
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor yang di uji Berkala		27,71	Persen	2.860.000.000	2.250.000.000	5.110.000.000	172.000.000	DAU/D AK
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	<i>Kecamatan Amahai</i>	1	Unit	1.000.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000	0	DAU/D AK
2	15	02	2.05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	<i>Tersebar di 18 Kec. Dan Jakarta, Makassar, Ambon, Surabaya</i>	3	Orang	60.000.000	0	60.000.000	0	DAU
2	15	02	2.05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	<i>Kota Masohi</i>	1	Unit	60.000.000	0	60.000.000	127.000.000	DAU
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Kota Masohi</i>	1	Dokumen	150.000.000	0	150.000.000	0	DAU
2	15	02	2.05	05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Tersebar di 18 Kecamatan</i>	1	Laporan	50.000.000	0	50.000.000	0	DAU
2	15	02	2.05	06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	<i>Tersebar di 18 Kecamatan</i>	1	Laporan	50.000.000	0	50.000.000	0	DAU



Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024 Sebelum Perubahan				Pagu Penyesuaian (DAU) Rp.	Sumber Dana	Catatan Penting
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK	Jumlah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU/DAK		
2	1	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Kecamatan Amahai	1	Unit	1.250.000.000	1.250.000.000	2.500.000.000	45.000.000	DAU/DAK
2	1	02	2.05	08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersebar di 18 Kecamatan	1	Laporan	120.000.000	0	120.000.000	0	DAU
2	1	02	2.05	09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersebar di 18 Kecamatan	1	Laporan	60.000.000	0	60.000.000	0	DAU
2	1	02	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersebar di 18 Kecamatan	1	Laporan	60.000.000	0	60.000.000	0	DAU
2	1	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan		25,00	Persen	400.000.000	0	400.000.000	0	DAU
2	1	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Tersebar di 18 Kecamatan	1	Laporan	100.000.000	0	100.000.000	0	DAU
2	1	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Tersebar di 18 Kecamatan	5	Unit	100.000.000	0	100.000.000	0	DAU
2	1	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Masohi	1	Laporan	200.000.000	0	200.000.000	0	DAU
2	1	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		7	Laporan	400.000.000	0	400.000.000	127.728.000	DAU
2	1	02	2.08	01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Jumlah Pegawai Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Tersebar di 18 Kec. Dan Jakarta, Makassar, Ambon, Surabaya	2	Orang	50.000.000	0	50.000.000	0	DAU
2	1	02	2.08	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kecamatan Amahai	1	Laporan	25.000.000	0	25.000.000	0	DAU



Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024 Sebelum Perubahan				Pagu Penyesuaian (DAU) Rp.	Sumber Dana	Catatan Penting
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK	Jumlah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU/DAK			
2	1	02	2.08	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Kota Masohi, Kec. Tehoru, Kec. Amahai, Kec. Salahutu, Kec. TNS	3 Laporan	75.000.000	0	75.000.000	30.215.000	DAU	
2	1	02	2.08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Tersebar 18 Kecamatan	1 Laporan	250.000.000	0	250.000.000	97.513.000	DAU	
2	1	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang yang disediakan		23,61 Unit	1.550.000.000	1.050.000.000	2.600.000.000	29.000.000	DAU/D AK	
2	1	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Tersebar 18 Kecamatan	7 Unit	1.050.000.000	1.050.000.000	2.100.000.000	29.000.000	DAU/D AK	
2	1	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		2 Laporan	500.000.000	0	500.000.000	0	DAU	
2	1	02	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan		3 Dokumen	350.000.000	-	350.000.000	0	DAU	
2	1	02	2.11	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Masohi	1	250.000.000	0	250.000.000	0	DAU	
2	1	02	2.10	02	Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	50.000.000	0	50.000.000	0	DAU	
2	1	02	2.10	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	50.000.000	0	50.000.000	0	DAU	
2	1	02	2.12		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang ditetapkan		1 Dokumen	300.000.000	0	300.000.000	0	DAU	



Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024 Sebelum Perubahan				Pagu Penyesuaian (DAU) Rp.	Sumber Dana	Catatan Penting
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK	Jumlah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU/DAK		
2	1	02	2.12	01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Masohi	1	Dokumen	250.000.000	0	250.000.000	0	DAU
2	1	02	2.12	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersebar di 18 Kecamatan	1	Dokumen	50.000.000	0	50.000.000	0	DAU
2	1	02	2.13		Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1	Dokumen	50.000.000	0	50.000.000	0	DAU
2	1	02	2.13	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Masohi	1	Dokumen	50.000.000	0	50.000.000	0	DAU
2	1	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek		3	Laporan	500.000.000	0	500.000.000	200.000.000	DAU
2	1	02	2.14	01	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersebar Di 18 kecamatan	3	Laporan	500.000.000	0	500.000.000	200.000.000	DAU
2	1	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pengelolaan Pelayaran		27,95	Persen	12.165.000.000	7.900.000.000	20.065.000.000	1.820.781.000	DAU/D AK



Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024 Sebelum Perubahan				Pagu Penyesuaian (DAU) Rp.	Sumber Dana	Catatan Penting	
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK				Jumlah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU/DAK
2	1	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha		2	Dokumen/ Laporan	100.000.000	0	100.000.000	0	DAU	
2	1	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersebar	1	Dokumen	50.000.000	0	50.000.000	0	DAU	
2	1	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersebar	1	Laporan	50.000.000	0	50.000.000	0	DAU	
2	1	03	2.02		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan Atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan Atau Badan Usaha		2	Dokumen/ Laporan	100.000.000	0	100.000.000		DAU	
2	1	03	2.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersebar	1	Dokumen	50.000.000	0	50.000.000	0	DAU	
2	1	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersebar	1	Laporan	50.000.000	0	50.000.000	0	DAU	



Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024 Sebelum Perubahan				Pagu Penyesuaian (DAU) Rp.	Sumber Dana	Catatan Penting
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK	Jumlah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU/DAK			
2	1	03	2.05		Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai Dengan Domisili Badan Usaha	Jumlah Dokumen/Laporan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan		2	Dokumen/Laporan	100.000.000	0	100.000.000	0	DAU
2	1	03	2.05	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai Dengan Domisili Badan Usaha kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersebar	1	Dokumen	50.000.000	0	50.000.000	0	DAU
2	1	03	2.05	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersebar	1	Laporan	50.000.000	0	50.000.000	0	DAU
2	1	03	2.06		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Lintasan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal pada jaringan jalur kereta api		2	Dokumen/Laporan	100.000.000	0	100.000.000	0	DAU
2	1	03	2.06	01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen, Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar	1	Dokumen	50.000.000	0	50.000.000	0	DAU



Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024 Sebelum Perubahan				Pagu Penyesuaian (DAU) Rp.	Sumber Dana	Catatan Penting
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK	Jumlah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU/DAK			
2	1	03	2.06	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar	1 Laporan	50.000.000	0	50.000.000	0	DAU	
2	1	03	2.07		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan lintasan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan		2 Dokumen/Laporan	100.000.000	0	100.000.000	0	DAU	
2	1	03	2.07	01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen, Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar	1 Dokumen	50.000.000	0	50.000.000	0	DAU	
2	1	03	2.07	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar	1 Laporan	50.000.000	0	50.000.000	0	DAU	
2	1	03	2.08		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Jumlah Dokumen/Laporan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal		2 Dokumen/Laporan	100.000.000	0	100.000.000	0	DAU	
2	1	03	2.08	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersebar	1 Dokumen	50.000.000	0	50.000.000	0	DAU	
2	1	03	2.08	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Tersebar	1 Laporan	50.000.000	0	50.000.000	0	DAU	



Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024 Sebelum Perubahan				Pagu Penyesuaian (DAU) Rp.	Sumber Dana	Catatan Penting
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK	Jumlah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU/DAK			
2	1	03	2.09		Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan		3 Dokumen/Laporan	150.000.000	0	150.000.000	0	DAU	
2	1	03	2.09	01	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar	1 Dokumen	50.000.000	0	50.000.000	0	DAU	
2	1	03	2.09	02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen, Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar	1 Laporan	50.000.000	0	50.000.000	0	DAU	
2	1	03	2.09	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar	1 Laporan	50.000.000	0	50.000.000	0	DAU	
2	1	03	2.10		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen/Laporan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal yang ditetapkan		12 Dokumen/Laporan	1.020.000.000	0	1.020.000.000	0	DAU	
2	1	03	2.10	01	Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kota Masohi, Salahutu, Seram Utara, Saparua, Nusalaut, P.H aruku	2 Dokumen	700.000.000	0	700.000.000	0	DAU	



Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024 Sebelum Perubahan				Pagu Penyesuaian (DAU) Rp.	Sumber Dana	Catatan Penting
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK	Jumlah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU/DAK			
2	1	03	2.10	02	Penetapan Kebijakan dan sosialisasi rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kota Masohi, Salahutu, Seram Utara, Saparua, Nusalaut, P.H aruku	2 Dokumen	200.000.000	0	200.000.000	0	DAU	
2	1	03	2.10	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Kota Masohi, Salahutu, Seram Utara, Saparua, Nusalaut, P.H aruku	8 Laporan	120.000.000	0	120.000.000	0	DAU	
2	1	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Pelabuhan Pengumpan Lokal yang dibangun, diterbitkan Izin Pembangunan dan Pengoperasian		27,95 Persen	9.945.000.000	7.900.000.000	17.845.000.000	1.820.781.000	DAU/D AK	
2	1	03	2.12	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terrsebar	1 Dokumen	25.000.000	0	25.000.000	0	DAU	
2	1	03	2.12	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	Terrsebar	18 Unit	7.595.000.000	7.000.000.000	14.595.000.000	1.761.687.000	DAU/D AK	
2	1	03	2.12	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Terrsebar	18 Unit	450.000.000	0	450.000.000	0	DAU	
2	1	03	2.12	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terrsebar	14 Laporan	75.000.000	0	75.000.000	59.094.000	DAU	
2	1	03	2.12	05	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia	Terrsebar	3 Unit	1.800.000.000	900.000.000	2.700.000.000	0	DAU/D AK	
2	1	03	2.14		Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen/Laporan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal		2 Dokumen/ Laporan	100.000.000	0	100.000.000	0	DAU	



Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024 Sebelum Perubahan				Pagu Penyesuaian (DAU) Rp.	Sumber Dana	Catatan Penting
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAK	Jumlah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DAU/DAK		
2	1	03	2.14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	<i>Terrsebar</i>	1	Dokumen	25.000.000	0	25.000.000	0	DAU
2	1	03	2.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dilaksanakan	<i>Terrsebar</i>	1	Laporan	75.000.000	0	75.000.000	0	DAU
2	1	03	2.15		Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal		43,75	Persen	350.000.000	0	350.000.000	0	DAU
2	1	03	2.15	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dilaksanakan	<i>Tersebar</i>	1	Dokumen	25.000.000	0	25.000.000	0	DAU
2	1	03	2.15	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	<i>Tersebar</i>	1	Laporan	25.000.000	0	25.000.000	0	DAU
2	1	03	2.15	03	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan pengumpan Lokal yang Tersedia	<i>Kota Masohi</i>	1	Unit	300.000.000	0	300.000.000	0	DAU
TOTAL JUMLAH PAGU 2024										38.016.050.000	13.200.000.000	51.216.050.000	9.756.044.7626	



BAB IV

P E N U T U P

Demikian Rencana Kerja Awal (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2024 ini dibuat, dengan harapan untuk mendapat pertimbangan selanjutnya dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, sehingga dengan demikian kedepan Sektor Perhubungan di Wilayah Kabupaten Maluku Tengah semakin berkembang sebagai satu upaya mensejahterakan masyarakat dan menunjang pengembangan ekonomi kerakyatan serta memberi pelayanan prima kepada pengguna jasa disektor Transportasi serta mewujudkan Kabupaten Maluku Tengah sebagai Jendela Indonesia Bagian Timur.



